



Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kendala pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda di sekolah yang ditemui oleh guru PPKN.

Populasi dalam penelitian ini adalah para guru yang mengajar PPKN yang sedang melanjutkan studi pada Program Studi PPKN Jenjang S-1 di PTS Kopertis Wilayah V DIY. Dari dua PTS yang membuka program studi PPKN terdapat 104 guru PPKN yang sedang melanjutkan studi yang semuanya dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data-data digunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif.

Kendala dan hambatan yang selalu dan sering ditemui guru dalam proses belajar mengajar PPKN adalah terbatasnya sarana dan prasarana (43,27%), keterbatasan waktu (30,48), kurangnya minat siswa (23,95%) dan kurangnya kemampuan guru (2,88%).

Kendala lainnya yang merupakan kelemahan adalah bahwa dalam menyampaikan materi PPKN masih di dominasi dengan metode ceramah dan metode tanya jawab yang sebenarnya kurang berdaya guna untuk tujuan yang bersifat mengubah sikap. Sebanyak 78,84 % guru selalu dan sering menggunakan metode ceramah dan 88,46 % guru selalu dan sering menggunakan metode tanya jawab. Penggunaan metode yang lebih sesuai untuk membina dan mengembangkan nilai dan sikap dalam PPKN, justru lebih sedikit penggunaannya masing-masing seperti metode bermain peran (2,88%), metode simulasi (2,88%), metode diskusi (32,69). Keadaan semacam ini tentunya harus dihindarkan, karena misi PPKN dalam hal ini adalah menitikberatkan pada aspek sikap (afektif). Untuk lebih mengoptimalkan tercapainya tujuan, guru dituntut untuk lebih memperbesar frekuensi penggunaan metode bermain peran, metode simulasi, metode diskusi dari pada metode ceramah maupun tanya jawab.

Begitu pula dalam mengevaluasi hasil belajar PPKN ternyata masih ditemui beberapa guru yang melaksanakan penilaian dengan tidak benar. Dalam mengevaluasi hasil belajar PPKN ada tiga aspek yang dinilai, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan perbuatan. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Masing-masing aspek tersebut dievaluasi dengan teknik penilaian yang berbeda. Sebagian guru (22,12%) dalam melaksanakan penilaian aspek sikap tidak menggunakan teknik penilaian skala sikap. Selanjutnya 16,35% guru tidak menggunakan teknik penilaian daftar riwayat kelakuan, atau catatan skala penilaian (*check list*) untuk menilai hasil belajar aspek perbuatan.

Termasuk juga kendala disini adalah bahwa dari 104 guru yang dijadikan responden ternyata hanya 32,69 % yang mempunyai kualifikasi ijazah PMPKN/PPKN. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar PPKN.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Kendala Guru Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Sekolah :: Studi Kasus pada Guru-Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang Sedang Melanjutkan Studi di PTS KOPERTIS Wilayah V  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Walfarianto, Drs. Sugiono, M.A.

Dipublikasikan oleh PTS KOPERTIS Wilayah V, Yogyakarta

Dengan melanjutkan studi pada program studi PPKN jenjang strata satu semua guru telah merasakan adanya manfaat yang berarti. Bertambahnya ilmu dan wawasan tentang PPKN akan lebih meningkatkan kualitas proses belajar mengajar PPKN yang pada gilirannya akan lebih mengoptimalkan keberhasilan pendidikan politik generasi muda di sekolah. Berhasilnya pelaksanaan pendidikan politik ini terutama sangat tergantung pada pengetahuan teknis guru dalam mata pelajaran PPKN serta pada kemampuan guru dalam menerapkan metode mengajar dengan tepat.

Dalam hubungannya dengan pendidikan politik bagi generasi muda di sekolah melalui PPKN ternyata dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan sesuai dengan harapan karena masih ditemuinya beberapa kendala sehingga hasilnya tidak optimal. Kendala ini tentunya akan berangsur-angsur berkurang seiring dengan meningkatnya pengetahuan para guru tentang PPKN yang mereka peroleh selama melanjutkan studi di program studi PPKN jenjang strata satu. Kurang berhasilnya pelaksanaan pendidikan politik, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap bidang kehidupan lain yang nantinya akan mempengaruhi berhasilnya pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional Indonesia.



This research aims at gaining the whole picture of him derance in administering the political education for the young generation at schools found by teachers of PPKN.

The population of this research is the teachers teaching PPKN who are studying in the study program on PPKN at S1 at the private Universities in Kopertis Wilayah V in Yogyakarta. There are 104 teachers of PPKN who are studying in two private Universities as the object of this research. In collecting the data the library and field research is used. The data yielded then are analyzed through the qualitative description.

The hindrances always faced by the teachers in the process of teaching and learning PPKN are the limitation of facilities (43,27%), time limitation (30,48%), lack of motivation from the students (23,95%) and lack of teachers ability (2,88%).

One other hindrance is that the teacher still use the lecturing method and ask-and-question method that are really not effective in changing the students attitude that dominate their way of non-storing the material of PPKN. 78,84% of the teacher always and often use the lecturing method, and 88,46% of the teachers always and often use the ask-and-question method. The methods that are more useful in building and developing the value and attitude in PPKN are less used. Such methods role playing method (2,88%), simulation method (2,88%), discussion method (32,69%). This situation should be avoided, because the mission of PPKN deals with the affective attitude. To gain the objective optimally, the teachers should more frequently apply the role playing method, the simulation method, the discussion method than the lecturing method and the ask and question method.

Also in evaluating the result of learning PPKN the teacher are found to still wrongly evaluate it. In evaluating the result of learning PPKN there are three aspects that should be considered : the knowledge aspect, the attitude, and the art. They are evaluated through the special evaluation technique. Some of the teachers (22,12%) do not use the technique of evaluating the attitude scale. And 16,35% of the teacher do not use the technique of evaluating the study list of their behavior, check list or the scale of evaluation for the result of their behavior aspect.

Included here is that of the 104 teachers functioning as the respondent turn out only 32,69% of them have a qualified certificate of PMPKN/PPKN. This will influence the quality of the teaching and learning process of PPKN.

By continuing their study in the PPKN study program at S-1 the teacher feel the significant benefit. The increase of knowledge and point of view on PPKN will raise the quality of the teaching and learning. Process of PPKN, and in turn it will maximize the result of political education to the young generation at school. The result of the political education specially depends on the technical knowledge of the teachers in administering the PPKN subject



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Kendala Guru Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda di Sekolah :: Studi Kasus pada Guru-Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang Sedang Melanjutkan Studi di PTS KOPERTIS Wilayah V

method Daerah Istimewa Yogyakarta

In relation to the political education for the young generation at schools through PPKN it turns out that the administration has not yet run satisfactorily, because the him deronce has come up and the result is not optimal, the him dorance will decrease little by little in accordance with the increase of the knowledge of the teachers on PPKN at S1. The lers satisfactory result of the political education directly or indirectly will influence the ofther side of life and in turn later it influence the result of the national development. The result of the national development in turn will increase the national resilience. Then the firm national resilience will rush further the national development in Indonesia.